

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANG**

ARTIKEL



OLEH

BETTI ARVITA

56340/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANG**

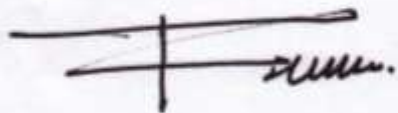
Oleh:

BETTI ARVITA
56340/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2015

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 197302713 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivyanny, SE, M.Ak
NIP : 19801019 200604 2 002

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Padang

Betti Arvita

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: bettiarvita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analisis komponen utama (*principal component analysis = PCA*). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padang, UPT Perparkiran kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA), dan juru parkir di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling* dan metode *purposive sampling* sebanyak 129 orang. Teknik analisis data yang digunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor utama penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir adalah faktor sosialisasi memiliki total *Eigenvalues* sebesar 3.292 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan faktor ini adalah 3.292 sedangkan nilai *percent of varians* 65.839 berarti faktor ini dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 65.839% dengan *loading factor* setiap pernyataan diatas 0,4.

Saran dalam penelitian ini adalah: Bagi Dinas Perhubungan sebaiknya pengarahan mengenai substansi, isi dan hal-hal lainnya menyangkut perda, serta bagaimana implementasi perda di lapangan agar diintensifkan sekali dalam sebulan. Menambah jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir. Serta mengefektifkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir.

Kata Kunci: retribusi parkir dan pemerintah daerah.

Abstract

This study aimed to determine: the factors that cause the low realization parking retribution in Padang. This research was a major component analysis (principal component analysis = PCA). The population in this study was the Department of Transportation, Communication and Informatics of Padang city, UPT parking area of Padang city, Department of Finance and Asset Management District (DPKA), and parking attendants in Padang. The sample was determined based on the total sampling method and purposive sampling method by 129 people. Data analysis technique used factor analysis with SPSS version 16.0 for Windows.

The results showed that: the main factor which causes the low realization of parking retribution is a socialization with total of Eigenvalues 3.292. it means the total variance explained these factors was 3.292. percent of variance 65.839 which this means factor can explicate the diversity of indicators 65.839% with loading factor each statement above 0.4.

It suggested for Department of Transportation: (1) to give at least attendant about the substance, the content and other matters related to the implementation of rule. (2) to increase the number of Supervisor of parking. (3) to supervise directly in order to minimize fraud or inappropriate which can be happened in collecting the retribution.

Keywords: parking retribution and local government

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada daerah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pemungutan tersebut harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ahmad (2013) sehubungan dengan upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kualitas daerah perlu dilakukan peningkatan PAD yaitu dengan mengoptimalkan penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi sebagai salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Ahmad (2013) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya retribusi daerah adalah bagian dari PAD yang keberadaan dan pemungutannya potensial untuk dipupuk dan dikembangkan, serta menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, 3) retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah retribusi parkir yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum. Retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2011 adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah sebaiknya melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan retribusi parkir salah satunya adalah dengan menentukan penyebab masih rendahnya realisasi penerimaan penerimaan retribusi parkir.

Menurut Markus (2006) penyebab dari tidak tercapainya target pendapatan disebabkan oleh juru parkir (jukir) dan kordinator lapangan (korlap) kurang diberikan informasi tentang peraturan daerah oleh Unit Pengelolaan (UP) perparkiran. Sementara itu permasalahan lainnya peraturan daerah dirasa kurang mengakomodinir kepentingan koordimotor lapangan (korlap). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut Unit Pengelolaan (UP) perparkiran Kota

Semarang mengeluarkan peraturan daerah tanpa melibatkan juru parkir dan kordinator lapangan artinya mengeluarkan kebijakan peraturan daerah parkir tepi jalan umum secara sepihak yang pada akhirnya hanya menyuruh para jukir menyettor kepada UP perparkiran menyebabkan terjadinya perilaku para jukir untuk menyettor retribusi parkir merasa keberatan untuk menyettor hasil retribusi parkir tepi jalan umum.

Selanjutnya Tirta (2012) menyatakan yang menyebabkan rendahnya retribusi parkir adalah pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan tidak tercapai. Kemudian pengawasan kegiatan retribusi parkir yang belum optimal. Selain itu yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir adalah efektifitas kemampuan organisasi belum mampu mencapai target atau hasil belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Untuk dapat meningkatkan potensi daerah dan kualitas daerah maka pemerintah harus mampu memberikan sosialisasi kepada juru parkir. Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme penyampaian informasi melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mira,2009). Dengan adanya sosialisasi yang lancar antara pemerintah dan juru parkir maka akan mampu meningkatkan retribusi daerah, karena dengan sosialisasi yang baik dan lancar maka informasi yang diterima dapat dipahami oleh penerima informasi tersebut.

Dalam menjaga kelancaran dan keefektifan sosialisasi, organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi

keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya (Indra,2010). Regulasi merupakan hal yang terpenting untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pemerintahan sehingga dapat terkelola dengan baik. Karena fungsi regulasi tersebut mengandung makna membela hak-hak masyarakat sehingga dengan adanya regulasi publik tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat menjadi meningkat sehingga penerimaan retribusi parkir juga meningkat.

Kelancaran suatu organisasi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir tidak hanya didukung oleh sosialisasi dan aturan-aturan yang dibuat oleh para pelaksana. Tetapi juga didukung dengan kesiapan, tindakan atau suatu sikap untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung objek tersebut (Azwar dalam Markus, 2006). Sedangkan juru parkir didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap juru parkir merupakan suatu penilaian juru parkir terhadap suatu kebijakan publik tertentu yang berakibat pada munculnya suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat. Sehingga dengan semakin baiknya sikap atau perilaku aparat pelaksana perparkiran di tepi jalan umum (juru parkir) dengan cara bersikap dan bertingkah laku melayani masyarakat dengan baik dan aktif berkoordinasi dengan UPT perparkiran maka nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Secara umum untuk mencapai hasil yang maksimal dalam suatu kegiatan dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, suatu kegiatan harus dikelola dengan baik dengan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Nugroho

dalam Dewi (2012) menyatakan pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi harus diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik oleh petugas-petugas aparatur pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak hanya dikelola dengan baik tetapi juga harus diawasi, karena pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Handoko (2003) menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan dilakukan agar keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik maka diharapkan dapat menutup celah penyimpangan terhadap penerimaan retribusi parkir yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi pajak.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini di Kota Padang adalah pemerintah kota Padang sampai saat ini

masih belum mampu meningkatkan penerimaan PAD, termasuk di dalamnya penerimaan retribusi daerah khususnya penerimaan retribusi parkir. Menurut data dari UPT perpajakan kota Padang target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel
Target dan Realisasi retribusi parkir
Kota Padang tahun 2011-2013

Tahun	Target	Realisasi	% Terealisasi
2011	3.211.453.650	986.387.500	30,71%
2012	3.010.800.000	1.645.646.000	54,66%
2013	3.754.890.882	1.556.616.500	41,46%

Sumber: UPT Perpajakan (Dishubkominfo) 2013

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini terlihat jelas pada tabel diatas bahwa penerimaan retribusi parkir masih sangat rendah dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2011 persentase terealisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai 30,71%. Nilai yang sangat kecil dan jauh dari target penerimaan yang ditentukan. Untuk dapat meningkatkan PAD maka efektivitas pemungutan retribusi parkir sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari fakta yang mana terlihat masih rendahnya realisasi retribusi parkir di Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi parkir di Kota Padang**”

penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apasaja yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang retribusi parkir dan juga dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan PAD dan juga dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan PAD dari retribusi parkir.

2. TELAAH LITERATUR

Retribusi Parkir

PERDA kota Padang No. 14 Tahun 2001 pengertian parkir yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Sedangkan untuk retribusi parkir itu sendiri menurut Ahmad (2013) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Lain halnya menurut Siahaan dalam Tirta (2012) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Wajib retribusi: orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Jalan umum yang dimaksud adalah jalan umum yang ditentukan oleh kepala daerah.
- 3) Penerimaan retribusi parkir sangat memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu di evaluasi kembali dalam pemungutan retribusi parkir. Besar kecilnya tarif retribusi sangat menentukan pendapatan retribusi tersebut.

- 4) Retribusi parkir dikenakan pada setiap kendaraan yang memarkir kendaraannya.
- 5) Perlu diberikan sanksi kepada juru parkir yang menetapkan tarif terlalu tinggi dan juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi kepada pihak pengelola atau kordinator parkir.
- 6) untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk dalam membantu pemerintah kota Padang dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini UPT Perparkiran kota Padang hal ini berdasarkan peraturan daerah kota Padang Nomor 12 tahun 2001.

Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan memiliki peranan dan andil yang cukup penting dalam mensosialisasikan retribusi ke seluruh juru parkir. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran juru parkir dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Ritcher Jr. dalam Sarjeni (2013) sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai seorang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Lain halnya yang dikemukakan oleh Mustofa dalam Nilla (2013), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Adapun indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak dalam Oktaviane (2013)

adalah kegiatan sadar dan peduli serta memodifikasi program pengembangan pelayanan : 1)Penyuluhan, 2)Diskusi dengan wajib pajak dan retribusi dan tokoh masyarakat, 3)Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak dan retribusi, 4)Pemasangan *billboard*, 5)*Website*.

Regulasi

Setiap organisasi publik menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dalam organisasi. Menurut Indra (2010) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Selain itu perumusan isi kebijakan harus dilakukan secara jelas, spesifik dan lebih baik lagi apabila dikuantifikasikan, dipahami serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, saling melengkapi dan mendukung serta mampu berperan sebagai pedoman bagi para pelaksanaan kebijakan di lapangan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimonitor (Abdul Wahab dalam Markus,2006).

Menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya 4 (empat) faktor yaitu:

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri
- b) Petugas yang menegakkannya
- c) Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum
- d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Sikap Juru Parkir

Menurut Azwar dalam Markus (2006) sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Berkowitz dalam Markus(2006) sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak

mendukung objek tersebut. Selanjutnya Myers dalam Markus (2006) mendefinisikan sikap (*attitude*) adalah *a favourable or unfavourable evaluative reaction to ward something or someone, exhibited in one's belief, feeling or intended behavior*. Sedangkan menurut Eagly & Chaiken dalam Sarlito (1998), *attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap juru parkir adalah suatu perilaku yang timbul dari dalam diri seseorang untuk membantu, mengatur dan bertanggungjawab atas kendaraan yang keluar masuk dalam area parkir serta memungut biaya parkir tersebut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Paramita (2005) indikator-indikator dari sikap juru parkir adalah: 1)Disiplin kerja, 2)Jujur dalam bekerja, 3)Komitmen kerja, 4)Tanggung jawab terhadap pekerjaan, 5)Kerjasama dengan rekan kerja, 6)Mengevaluasi pekerjaan.

Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih baik sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Manajemen (Pengelolaan) menurut Dharma (2012) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien. Sedangkan Menurut G.R. Terry dalam Andi (2010) defenisi manajemen sebagai berikut: "Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik

ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sehubungan pengertian pengelolaan sebagaimana proses maka dapat diambil inti sari bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut: a)Perencanaan, b)Pengorganisasian, c)Penyusunan staf d)Penggerakan

Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kota Padang memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang di sektor retribusi parkir. Menurut Irma (2009) indikator manajemen pengelolaan yaitu: 1)Jumlah dan sikap mental, 2)Disiplin, 3)Motivasi kerja, 4)Pemahaman pegawai terhadap tupoksi.

Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya. Selain itu pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua tugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Menurut Handoko (2003) mendefenisikan pengawasan sebagai berikut: “pengawasan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai . ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Indikator pengawasan menurut Juhir dalam Anita (2010) adalah: 1)Menjamin ketetapan pelaksanaan, 2)Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan, 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan, 4)Menjamin kepuasan masyarakat, 5)Membina kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis komponen utama (*principal component analysis = PCA*) yaitu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data, dengan cara mentransformasi data secara linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varians maksimum. Setelah dianalisa diharapkan hasilnya bisa menjadi hipotesa untuk penelitian berikutnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padang, UPT Perparkiran kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA), dan juru parkir di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan dua metode penarikan sampel yaitu *total sampling* untuk UPT Perparkiran kota Padang dan juru parkir kota Padang, karena populasinya kurang dari 100 subjek, dan *purposive sampling* untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padang dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, UPT Perparkiran Kota Padang, kepala bidang pengendalian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA), seksi retribusi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) dan petugas pemungut retribusi parkir (juru parkir).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau ka-

rakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembalannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner: sosialisasi, regulasi, sikap, pengelolaan, pengawasan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20.0. Umar (2005) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliabel
- b. 0.6-0.7 dapat diterima
- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung menggunakan rumus:

Rata-Rata Skor

$$= \frac{(5 SS) + (4 S) + (3 KS) + (2 TS) + (1 STS)}{15}$$

Dimana:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Menghitung nilai rerata jawaban responden menggunakan rumus :

$$\text{Mean} = \sum_{h=1}^n xi$$

Dimana :

xi = Skor total

n = Jumlah responden

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$\text{TCR} = \frac{\text{Rata-RataSkor}}{5}$$

2. Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi pokok atau keteraturan sebuah fenomena.

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatori (*confirmatory factor analysis*) yang digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator dapat mengkonfirmasi variabelnya. Dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dapat ditentukan indikator variabel yang sebenarnya dan mengelompokkannya ke dalam faktor-faktor penelitian.

Analisis faktor dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$F_j = b_{j1}X_{s1} + b_{j2}X_2 + b_{jk}X_{sk}$$

Keterangan:

F_j = skor faktor ke-j

B_j = koefisien skor faktor ke-j

X_{sk} = variabel ke-k yang telah distandardisasi

Langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor sebagai berikut :

1. Menentukan variable apa saja yang akan dianalisis
2. Menguji variabel - variabel yang ditentukan dengan menggunakan metode *bartlett's test of sphericity*

serta pengukuran MSA (*measure of sampling adenyency*).

3. Melakukan proses ini pada analisis faktor yaitu factoring atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel yang telah lolos pada ujivariabel sebelumnya. Melakukan *factor rotatin* atau rotasi terhadap faktor yang telah dibentuk. Tujuan itu untuk memperjelas variable yang masuk akan kedalam faktor penentu.
4. Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya memberi nama atas faktor yang terbentuk tersebut yang dianggap bisa mewakili variabel anggotanya.

Beberapa konsep yang berhubungan dengan analisis faktor yaitu :

- a. Nilai Kaiser meyer olkin (KMO), adalah untuk menguji ketepatan analisis faktor yang dilakukan. Nilai yang berkisar antara 0,5 sama dengan 1 mengidentifikasi analisis faktor dapat dilanjutkan
- b. *Eigenvalue*, adalah nilai yang mewakili total varian yang dapat dijelaskan oleh setiap faktor.
- c. *Communalitiy*, adalah jumlah varian yang dimiliki oleh semua variable yang dianalisis dan sebagai proposi varian yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk
- d. Faktor *loading*, adalah keeratan hubungan (korelasi) antara variable-variabel yang ada dengan faktor-faktor yang nantinya terbentuk
- e. Faktor matrik, adalah memuat faktor loading dari seluruh variable pada faktor yang telah terbentuk.

Definisi Operasional

1. Retribusi Parkir
retribusi parkir merupakan pungutan pendapatan sebagai pembayaran pemakaian atas jasa tempat parkir yang disediakan secara langsung yang dimiliki oleh orang atau badan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Sosialisasi

sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

3. Regulasi
regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi social masyarakat lain.
4. Sikap juru parkir
sikap juru parkir adalah suatu penilaian juru parkir terhadap suatu kebijakan publik tertentu yang berakibat pada munculnya suatu perasaan tertentu terhadap suatu kebijakan publik tersebut
5. Pengelolaan
pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
6. Pengawasan
Pengawasan adalah proses pengamatan atau proses penentuan apa yang seharusnya dicapai untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, UPT Perparkiran Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, dan juru parkir yang

ada di Kota Padang. Untuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang hanya kepala dinas yang dijadikan sebagai responden, sedangkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang dijadikan responden adalah bagian pengendalian. Selanjutnya untuk UPT Perparkiran Kota Padang dan juru parkir seluruhnya dijadikan responden. Dari empat sampel tersebut, disebarakan sebanyak 129 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 119 kuesioner. Dilihat bahwa dari kuesioner yang disebarakan, hanya 89,15% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 10 Oktober 2014 sampai dengan 7 November 2014.

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1

Dari Tabel 1 diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 115 orang dari 4 populasi yaitu Dinas Perhubungan, DPKA, UPT perparkiran dan juru parkir di Kota Padang. Untuk variabel sosialisasi (X_1) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 21.59 dengan standar deviasi 2.499 sedangkan nilai tertinggi 25.00 dan nilai terendah 14.00. Untuk variabel regulasi (X_2) nilai rata-rata sebesar 17.30 dengan standar deviasi 2.156 sedangkan nilai tertinggi 20.00 dan nilai terendah 11.00. Untuk variabel sikap (X_3) nilai rata-rata sebesar 23.92 dengan standar deviasi 4.033 sedangkan nilai tertinggi sebesar 30.00 dan nilai terendah sebesar 15.00. Untuk variabel pengelolaan (X_4) nilai rata-rata sebesar 19.76 dengan standar deviasi 3.679 sedangkan nilai tertinggi

sebesar 25.00 dan nilai terendah sebesar 14.00. Untuk variabel pengawasan (X_5) nilai rata-rata sebesar 41.80 dengan standar deviasi 4.486 sedangkan nilai tertinggi sebesar 50.00 dan nilai terendah sebesar 34.00.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 115$ adalah 0.1832. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel

Tabel 2

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 semuanya diatas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 3

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *cronbach's alpha* yang terdapat pada Tabel 3 diatas yaitu instrumen variabel sosialisasi 0.775. Untuk instrument regulasi 0.718 dan untuk instrument sikap 0.780. Selanjutnya instrument pengelolaan 0.818 dan untuk instrumen pengawasan 0.836. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliable.

Analisis Faktor

1. Matriks Korelasi

Matriks korelasi digunakan untuk mengetahui apakah semua indikator yang akan digunakan memiliki korelasi yang

erat diantara sesamanya dengan nilai *Keiser-Meyer-Measure of Sampling Adegeuncy* atau *KMO MSA*. Dari **Tabel 4** terlihat bahwa nilai *KMO MSA* yang diperoleh adalah sebesar 0.845 maka indikator dapat diproses lebih lanjut.

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan diantara setiap indikator dilihat pada **Tabel Anti-Image Matrices**

Pada **Tabel 5** diatas menunjukkan 0.845 dengan signifikansi 0.000 yang berarti *KMO* and *bartlett's* tersebut memenuhi batas angka *KMO* and *bartlett's* 0.5 ($0.845 > 0.5$) dan signifikan .000 yang berada jauh dibawah 0.5 ($.000 < 0.5$) yang dapat disimpulkan bahwa variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. Angka *Anti Image Correlation* menunjukkan *MSA* yang berada diatas 0.5 yaitu untuk X_1 (sosialisasi) sebesar .891^a, X_2 (regulasi) sebesar .822^a, X_3 (sikap) sebesar .792^a, X_4 (pengelolaan) sebesar .909^a. Dan untuk X_5 (pengawasan) sebesar .849^a. Hal ini menunjukkan variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut.

2. *Communalities*

Communalities merupakan jumlah varian yang dimiliki oleh semua variabel yang dianalisis atau sebagai proporsi yang dapat dijelaskan faktor-faktor umum. Semakin kecil *communalities* sebuah variabel akan semakin lemah hubungannya dengan variabel yang terbentuk. Nilai *communalities* dapat dilihat pada **Tabel 6**.

3. Penentuan Jumlah Faktor

Penentuan jumlah faktor dapat didasarkan pada *eigenvalue* besar dari 1. *Eigenvalues* menunjukkan kepentingan relative masing-masing faktor dalam menghitung varian setiap variabel yang di analisis. Untuk menghitung varian ke empat variabel maka angka *eigenvalues* untuk ke empat variabel adalah sama dengan total ke empat variabel. Penentuan pembentukan faktor di dasarkan pada kriteria angka *eigenvalues* yang berada di bawah 1 tidak digunakan dalam

menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Adapun hasil *eigenvalues* dapat dilihat pada **Tabel 7**.

Analisis berikutnya adalah apakah faktor yang terbentuk memiliki korelasi antar variabel sudah tepat atau dengan cara melihat korelasi keenam faktor yang terbentuk. Hasil korelasi antara variabel dapat dilihat dari component matrix yang tersaji pada **Tabel 8**.

Pembahasan

1. Faktor 1 (Sosialisasi)

Faktor 1 terkonfirmasi memiliki 5 pernyataan yang membentuk faktor 1. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang terkonfirmasi dalam faktor 1. pernyataan yang mengarah atau yang terkonfirmasi pada faktor 1 adalah pernyataan X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 dengan *loading factor* setiap pernyataan diatas 0,4. Pernyataan yang memiliki *loading factor* terbesar adalah pernyataan 2 dengan nilai *loading factor* sebesar 0.910. Sedangkan pernyataan yang memiliki *loading factor* terkecil adalah pernyataan 1 dengan nilai *loading factor* 0.774. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa *loading factor* setiap pernyataan dari faktor 1 ini memiliki nilai antara 0,7 – 0,9 yang mengarah pada sosialisasi. Artinya faktor ini dominan dalam mendorong penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir.

Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan penyampaian informasi yang memiliki peran dan andil untuk memperoleh pengetahuan dalam kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ritcher Jr. Dalam Sarjeni (2013) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai seorang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

Apabila sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan dalam suatu organisasi berkualitas dan kualitas informasi yang

disampaikan mudah dipahami dan diterima dengan baik. Maka tujuan organisasi dapat segera tercapai sehingga penerimaan retribusi parkir juga dapat ditingkatkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas UPT kurang optimal dan belum berhasil memenuhi targetnya. Ini disebabkan karena sebagian besar juru parkir mengikuti kegiatan sosialisasi dan kurang memahami pentingnya penyuluhan. Dan dianggap sebagai suatu keharusan yang bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja para juru parkir tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh.

Hasil Wawancara

Hasil temuan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Dinas Perhubungan, kepala UPT Perparkiran, kepala bidang pengendalian DPKA serta juru parkir mengenai Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Padang. Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang terlihat bahwa Dinas Perhubungan belum mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir yang terbukti dari setiap tahunnya penerimaan retribusi parkir selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian untuk melakukan peningkatan penerimaan retribusi parkir tersebut tentunya tidak terlepas dari pemecahan masalah dari faktor-faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga beberapa tahun terakhir penerimaan retribusi parkir masih jauh dari target yang ditetapkan.

1. Bencana Alam

Pasca gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009 menyebabkan parkir-parkir di Kota Padang menjadi tidak teratur, semrawut atau tidak tertata dan tidak terkelola dengan baik. Sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir jauh

dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan diharapkan mengawasi dan menata kembali lokasi parkir dengan tertib dan rapi sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik sehingga retribusi akan meningkat.

2. Pengalihfungsian lahan parkir

Lahan atau lokasi parkir banyak ditempati pedagang kaki lima (PKL) untuk menjual dagangannya sehingga lahan parkir menjadi sempit dan terhambat. Oleh karena itu Dinas Perhubungan sebaiknya menertibkan jam operasional parkir, dan menciptakan lahan parkir khusus hanya pada satu tempat.

3. Space parkir

Walaupun kendaraan bertambah tapi *space* untuk parkir tetap (tidak berubah) tidak akan menambah jumlah pada retribusi. Oleh karena itu Dinas Perhubungan sebaiknya menambah *space* parkir dan menciptakan lahan parkir khusus yang kondusif hanya pada satu tempat di tempat-tempat yang dianggap potensial atau wilayah yang ramai kunjungan, seperti:

- a) Objek wisata
- b) Mall
- c) Rumah sakit
- d) Dan lain-lainnya

4. Pengelolaan parkir dan karcis parkir

Tidak relevannya antara setoran penerimaan retribusi parkir yang masuk ke pemko dengan karcis parkir yang dibagikan atau yang terjual. Karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan parkir menggunakan sistem kontrak lahan parkir. Jadi karcis parkir hanya dijadikan sebagai formalitas parkir saja, karcis tidak dibagikan dan menjadi permainan juru parkir untuk memperoleh keuntungan tersendiri. Karcis tersebut tidak dijadikan kendali demi kenyamanan masyarakat yang memarkirkan kendaraan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan sebaiknya meningkatkan pengawasan dan menambah

jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan mengembalikan pengelolaan operasional parkir di tepi jalan umum. Kemudian menambah anggaran pengawasan dan mengoptimalkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perparkiran serta menunjang terhadap pengawasan terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Selain itu Dinas Perhubungan sebaiknya segera menjalankan parkir berasuransi sehingga setiap kendaraan yang parkir kendaraannya akan terjaga dan aman, juga akan dapat menghilangkan kebocoran-kebocoran pada parkir.

5. Kontrak lahan parkir

Pengelolaan parkir seperti yang telah disebutkan pada poin diatas, pengelolaan parkir menggunakan sistem kontrak lahan parkir. Bentuk kontrol dari Dinas Perhubungan tidak ada karena kontrak pembayaran sudah ditetapkan. Jika kontrak yang diberikan dalam satu hari sebesar Rp 50.000,- berarti karcis yang diberikan kepada juru parkir sebanyak 50 karcis. Jika karcis yang diberikan habis maka juru parkir bisa meminta tarif retribusi diatas Rp 1000,- dan bentuk pengendalian, pengelolaan dan pengawasan dari Dinas Perhubungan sendiri masih menjadi permasalahan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebaiknya meningkatkan pengawasan sebagai bentuk kontrol terhadap para juru parkir yang meminta tarif lebih dari yang telah ditetapkan. Serta mengefektifkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir.

6. Tarif retribusi parkir yang tidak merata

Juru parkir mayoritas meminta tarif retribusi parkir kepada pengguna parkir tidak sesuai dengan karcis parkir yang telah diberikan dari Dinas

Perhubungan. Ini terjadi karena tidak adanya anggaran untuk membayar gaji para juru parkir. Sehingga para juru parkir memperoleh pendapatan dan keuntungan dari besarnya tarif parkir yang diminta kepada pengguna parkir. Oleh karena itu Dinas Perhubungan sebaiknya memberikan standar gaji bagi juru parkir sesuai dengan upah yang memadai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang” adalah sebagai berikut:

1. hasil data primer

Dari lima faktor yang diteliti, faktor yang mempengaruhi atau faktor yang paling dominan Penyebab Rendahnya Retribusi Parkir di Kota Padang adalah variabel sosialisasi yang memiliki total *eigenvalues* yang berada di atas 1 yaitu sebesar 3.292. Artinya nilai faktor *eigenvalues* tersebut mencerminkan besarnya korelasi antara variabel dengan faktor yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai *eigenvalues* atau lebih dari 1 menunjukkan semakin erat hubungan variabel dengan faktor tersebut. Sosialisasi memiliki lima indikator yaitu penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, pemasangan *billboard*, *website* yang memberikan pengaruh terhadap rendahnya retribusi parkir di Kota Padang.

2. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyebab masih rendahnya retribusi parkir di Kota padang adalah:

- a) Bencana alam pasca gempa bumi tahun 2009.
- b) Pengalihfungsian lahan parkir menjadi lahan pedagang kaki lima (PKL).
- c) *Space* parkir yang tetap (tidak berubah).

- d) Tidak relevan antara setoran penerimaan retribusi parkir dengan karcis yang terjual.
- e) Pengelolaan parkir yang terjadi menggunakan sistem kontrak lahan parkir.
- f) Tarif retribusi parkir yang tidak merata.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pengarahan mengenai substansi, isi dan hal-hal lainnya menyangkut perda serta bagaimana implementasi perda di lapangan agar diintensifkan frekuensinya minimal sekali dalam sebulan. Sebagai langkah awal agar Juru Parkir tahu dan mengerti mengenai perda maka mereka diberikan buku tentang perda, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Selanjutnya dalam setiap pengarahannya ataupun penyampaian informasi serta media yang digunakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan Juru Parkir sehingga akan mempermudah mereka untuk menyerap dan memahami informasi tentang perda.
2. Mengawasi dan menata kembali lokasi parkir dengan tertib dan rapi sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik.
3. Menertibkan jam operasional parkir di kawasan padat.
4. menambah *space* parkir dan menciptakan lahan parkir khusus yang kondusif hanya pada satu tempat di tempat-tempat yang dianggap potensial atau wilayah yang ramai kunjungan.
5. Menambah jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir. Serta mengefektifkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir

kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir. Selanjutnya mengoptimalkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perparkiran serta menunjang terhadap pengawasan terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir

6. Segera menjalankan parkir berasuransi sehingga setiap kendaraan yang parkir kendaraannya akan terjaga dan aman.
7. Memberikan standar gaji bagi juru parkir sesuai dengan upah yang memadai.
8. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di Kota Padang. Kemudian untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab rendahnya retribusi parkir tidak hanya dari pihak dinas dan pengelola parkir saja tetapi juga dari pihak pengguna parkir atau masyarakat, Karena pada penelitian ini peneliti hanya meneliti jumlah responden atau sampel pada bagian atau dari sisi dinas dan pihak-pihak pengelola parkir saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negarab.* Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Andi, Asrul Samanglangi. 2010. *Analysis about tax management areas in suppoting revenue in the district soppeng.* Jurnal. Universitas hasanuddin.
- Anita, Rozalina. 2010. *Pengaruh dari DPRD, Pengendalian Intern dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance.* Skripsi. Fakultas

- Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Baswir, Revrison. 2003. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : PPF
- Dharma, Setyawan Salam, 2004. *manajemen pemerintahan indonesia*. Jakarta : Djembatan
- Dewi. 2012. *Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Melalui <http://www.google.com> [10/12/2013]
- Elvi. 2012. *Analisis Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang*. Jurnal Socioscientia Volume 4 Kopertis Wilayah XI Kalimantan. Melalui <http://www.google.com> [25/10/2013]
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- Irma, Suryani. 2009. *Analisis Strategi Peningkatan Retribusi Pasar*. jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kamal. (2011). *Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Retribusi Terhadap Pendapatan Retribusi Parkir*. Tesis. Ilmu Administrasi Universitas Pasundan Bandung. Melalui <http://www.google.com> [31/10/2013]
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset,
- 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Markus. 2006. *Studi Implementasi PERDA No 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang*. Tesis. Ilmu Admistrasi Universitas Diponegoro. Melalui <http://www.google.com> [26/10/2013]
- Mahmudi. 2007. *Manajen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : ALFABETA
- Nilla. 2013. *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. skripsi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Nory. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada*

- Pemerintah Daerah Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Oktaviane. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Melalui <http://www.google.com> [25/10/2013]
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Umum.
- _____ Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan perparkiran.
- _____ Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1998. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Balai Pustaka
- Sarjeni. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sekaran, Umar. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sherra. 2008. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan BPHTB*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soelarno, Slamet. 2003. *Administrasi Pendapatan Daerah*. Jakarta : STIA LAN pers
- Solchan, Hartono. 2002. *evaluasi fungsi regulasi dalam pajak daerah dan retribusi daerah*. jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri, Hasnaeni Asis. 2013. *Optimalisasi pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Banten*. jurnal. Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA.
- Syafei, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Syarifah, Nurul Hikmah. 2013. *Pengawasan Retribusi Parkir di kota Pontianak*. jurnal. Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sosialisasi	115	14	25	21.59	2.499
regulasi	115	11	20	17.30	2.156
sikap	115	15	30	23.92	4.033
pengelolaan	115	14	25	19.76	3.679
pengawasan	115	34	50	41.80	4.486
Valid N (listwise)	115				

Tabel 2 Uji Validitas

nilai *Corrected Item-Total Colleration* Terkecil

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Colleration</i> Terkecil
Sosialisasi	0.223
Regulasi	0.285
Sikap	0.333
Pengelolaan	0.305
Pengawasan	0.297

Tabel 3 Uji Reliabilitas

Nilai *Cronbach's Alpha*

Instrumen Variabel	Nilai <i>cronbach's alpha</i>
Sosialisasi	0.775
Regulasi	0.718
Sikap	0.780
Pengelolaan	0.818
Pengawasan	0.836

Tabel 4: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.845
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	270.734
	Df	10
	Sig.	.000

Tabel 5: Anti-image Matrices

		sosialisasi	regulasi	Sikap	pengelolaan	pengawasan
Anti-image Covariance	sosialisasi	.549	-.053	-.064	-.107	-.142
	regulasi	-.053	.455	-.204	-.036	-.032
	sikap	-.064	-.204	.346	-.056	-.135
	pengelolaan	-.107	-.036	-.056	.635	-.117
	pengawasan	-.142	-.032	-.135	-.117	.433
Anti-image Correlation	sosialisasi	.891 ^a	-.106	-.147	-.181	-.290
	regulasi	-.106	.822 ^a	-.514	-.067	-.073
	Sikap	-.147	-.514	.792 ^a	-.120	-.348
	pengelolaan	-.181	-.067	-.120	.909 ^a	-.224
	pengawasan	-.290	-.073	-.348	-.224	.849 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Tabel 6: Communalities

	Initial	Extraction
Sosialisasi	1.000	.620
Regulasi	1.000	.653
Sikap	1.000	.767
Pengelolaan	1.000	.533
Pengawasan	1.000	.719

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel 7: Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues		
	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.292	65.839	65.839
2	.599	11.976	77.815
3	.492	9.840	87.655
4	.374	7.485	95.140
5	.243	4.860	100.000

Component Matrix^a

	Component
	1
sikap	.876
pengawasan	.848
regulasi	.808
sosialisasi	.787
pengelolaan	.730

Extraction Method:
Principal Component
Analysis.

a. 1 components extracted.